

RENCANA KERJA TAHUN 2020



**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatNya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan bidang Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, April 2019
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2018	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan.....	38
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pangan	40
BAB V PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada tanggal 16 November 2012 lahir karena didasarkan pada negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Melalui Undang-Undang ini, setiap warga negara perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan “Ketahanan Pangan”, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan “Keamanan Pangan”, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan (2) meningkatkan sistem distribusi dan

stabilisasi harga pangan (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan sampai kerumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan menangani kerawanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi pangan didalam negeri menuju kemandirian pangan (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif (c) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan (b) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan (c) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan terigu guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial (c) mengembangkan keamanan pangan segar didaerah sentra produksi pangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025; dan
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Pesisir

Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang pangan.

Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas pangan Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang pangan;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2020;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
- 2.2. Daerah
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
- 2.4. Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan Tahun 2018

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2019**

Dinas Pangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat capaian realisasi target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wajib Non Pelayanan Dasar									
					Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (%)	80	80,5	79	72,9	93,46	81	0	0
1	02	03	01		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
1	02	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%

1	02	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kecukupan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya televisi 1 unit, Printer 1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
1	02	03	02	10	Pengadaan Meubiler	Tersedianya kursi rapat 1 paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	25%

1	02	03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor selama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%	
1	02	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%	
1	02	03	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	-	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%	
1	02	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terfasilitasinya kebutuhan aparatur dalam rangka peningkatan SDMnya		-	100%	100%	100%	-	-	25%	-
1	02	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	03	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	135	142	132,13	132	100,1%	137	-	-	-
1	02	03	16	01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	11 kk	11 kk	-	-	-	12 kk	-	-	0%
1	02	03	16	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya pemberdayaan kelompok desa mandiri pangan dan pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan	14 kelompok mandiri pangan	14 kelompok mandiri pangan	14 kelompok mandiri pangan	14 kelompok mandiri pangan	100%	14 kelompok mandiri pangan	4 kelompok mandiri pangan	-	28,5%
1	02	03	16	43	Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan dan pengisian lumbung pangan masyarakat	23 kelompok lumbung pangan	23 kelompok lumbung pangan	23 kelompok lumbung pangan	23 kelompok lumbung pangan	100%	23 kelompok lumbung pangan	5 kelompok lumbung pangan	-	21,73%

1	02	03	16	44	Panel dan Pemantauan Harga Pangan Pokok	Terlaksananya pemantauan harga pangan disetiap kecamatan	-	-	15 pasar	15 pasar	100%	-	-	-
1	02	03	16	45	Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	Terlaksananya produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan, dan HBKN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	3 bulan	25%
1	02	03	16	46	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten pesisir selatan	5,25 ton	5,25 ton	6 ton	6 ton	100%	5 ton	-	-
1	02	03	16	52	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan(FSVA)	Terlaksananya pemetaan ketahanan pangan dan kerentanan pangan daerah	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	0%
1	02	03	16	53	Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat sebanyak 6 gapoktan	6 gapoktan	6 gapoktan	6 gapoktan	6 gapoktan	100%	6 gapoktan	2 gapoktan	33,33%
1	02	03	16	64	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI	Pengembangan usaha pangan masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan pengendalian harga	3 TTI	3 TTI	2 TTI	2 TTI	100%	4 TTI	2 TTI	50%
1	02	03	16	68	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlaksananya penyusunan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan analisa neraca bahan makanan (NBM)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%

1	02	03	16	69	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Terlaksananya pemantauan dan analisis terhadap kondisi pangan dan gizi masyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
1	02	03	17		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat konsumsi energi (kkal/kapita/hari), tingkat konsumsi protein (gram/kapita/hari)	2 247 kkal/kapita /hari. 60gram/ kapita/ hari)	2.326 kkal/kapita/ hari. 61,78 gram/ kapita/ hari)	2.271 kkal/kapita /hari. 61 gram/ kapita/ hari)	2.377,4 kkal/kapita /hari. 63 gram/ kapita/ hari)	2.223 kkal/kap ita /hari. 59 gram/ kapita/ hari)	-	-	0%
1	02	03	17	05	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Terlaksananya promosi bidang ketahanan pangan sebanyak 4 kali promosi	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	4 kali	2 kali	100%
1	02	03	17	06	Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan wanita dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada KWT	5 KWT	5 KWT	10 KWT	10 KWT	100%	9 KWT	5 KWT	55,5%
1	02	03	17	07	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	10 kali	4 kali	40%
1	02	03	17	08	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Terlaksananya penyusunan analisis pola pangan harapan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
1	02	03	17	17	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya rapat koordinasi DKP sebanyak 1 kali dan penilaian APN sebanyak 1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	1 kali	50%
1	02	03	17	21	Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani)	Terlaksananya Penas Tani	-	-	1 kali	1 kali	100%	-	-	0%

1	02	03	17	22	Tekhnologi Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha pangan lokal	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	-	0%
1	02	03	17	23	Model Percontohan Kemanan Pangan	Terbentuknya nagari aman pangan	1 nagari	1 nagari	-	-	-	1 nagari	-	0%
1	02	03	17	24	Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Terlaksananya gerakan konsumsi dan lomba cipta menu B2SA sebanyak 2 kali dan sosialisasi sebanyak 1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	0 kali	0%
1	02	03	17	25	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutu pangan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	5 kecamatan	33,33%
1	02	03	17	28	Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan	Tersusunnya ranperda ketahanan pangan	-	-	-			1 dokumen	1 dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pangan terbentuk pada akhir tahun 2016 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan sampai tahun 2018 secara umum masih melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan

- Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 97,85 %

Kegiatan yang dilakukan dalam menangani daerah rawan pangan adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana banjir di Kecamatan Lengayang dan Ranah Pesisir berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Pesisir Selatan Tentang Bencana Banjir dan Tanah Longsor Nomor 360/187/BPBD-PS/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dengan bantuan 570 paket bantuan makanan berupa beras dan mie instant. Selain itu, bantuan juga dilakukan pemberian bantuan gizi buruk untuk 12 orang.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,52 %.

Pada tahun 2018, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan di Desa Mandiri Pangan Penumbunhan Tahun 2012 Tahap Mandiri (Koto Tangah Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas). Selain itu juga dilakukan pembinaan di Desa Mandiri Pangan Replikasi Tahun 2011 (Tanjung Saba, Kampung Tangah dan Lereng Bukik. Selain itu juga dilakukan pembinaan di Kawasan Mandiri Pangan (KMP Tahun 2015) dengan anggaran

sebesar Rp200.000.000 untuk lima nagari (Nagari Tluk Kualo Indrapura bantuan sebesar Rp50.000.000,- Nagari Lubuk Betung Indrapura bantuan sebesar Rp55.000.000,- Nagari Damar lapan Batang Indrapura bantuan sebesar Rp20.000.000, Nagari Indrapura Utara bantuan sebesar Rp 55.000.000, serta Nagari Hilalang Panjang Indrapura bantuan sebesar Rp20.000.000,-. Berdasarkan pembinaan, monitoring dan evaluasi di lapangan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, pencairan Dana Bansos untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Kelompok Jasa Mandiri Kampung Laban Salido (Rp38.411.405), Kelompok Kapujan Indah Nagari Kapujan (Rp50.000.000), Kelompok Sungai Bungin Nagari IV Koto Hilir (Rp30.000.000), Kelompok Bakung Mekar Gurun Panjang Utara (Rp27.284.000), Kelompok Reflikasi Lereng Bukit Gurun Panjang (Rp 17.729.000).

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,80 %.

Kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat sampai tahun 2018. Dari 23 unit lumbung pangan, 8 kelompok lumbung pangan tahap pengembangan dengan kondisi 7 kelompok dalam kondisi aktif sedangkan 1 kelompok dengan kondisi kurang aktif. Sedangkan 14 kelompok dalam tahap mandiri, 10 kelompok dalam kondisi aktif dan 4 kelompok dalam kondisi tidak aktif, sedangkan 1 kelompok lagi belum memperoleh bantuan pemerintah.

- Kegiatan Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,82%.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau produksi pangan, jaringan distribusi serta pasokan pangan di tingkat kecamatan. Selain itu juga dilakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan Nasional yang berfungsi menekan gejolak harga.

- Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,93 %

Pada akhir Tahun 2017, jumlah cadangan pangan pemerintah yang berada di Bulog sebanyak 40,5 ton. Pada awal tahun 2018, terjadi bencana banjir di beberapa daerah sehingga beras cadangan pangan disalurkan untuk daerah rawan pangan sebanyak 2,5 ton. Pada Tahun 2018 pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 5,25 ton sehingga total beras cadangan pangan sampai saat ini adalah sebanyak 43,25 ton. Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sebaiknya dilakukan secara mandiri, serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,80 %

Kegiatan ini berupa pemberdayaan 5 Gapoktan yang mendapatkan alokasi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 225.000.000,- dari Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk dana Dekosentrasi. Kegiatan Gapoktan sebagai lembaga distribusi pangan yaitu pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengolahan gabah dan beras. Lembaga distribusi pangan masyarakat juga berperan dalam stabilitas harga pangan saat musim paceklik maupun panen raya. Saat musim paceklik lembaga ini harus dapat menyediakan dan mendistribusi pangan ditingkat masyarakat dan ke pasar-pasar dan menampung hasil panen masyarakat saat panen dengan harga yang wajar dan Gapoktan pelaksana kegiatan ini dengan mitranya dapat bersaing dengan pedagang luar Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi mempromosikan kualitas beras keluar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil pembinaan ke lapangan didapatkan perkembangan kegiatan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) sebagai berikut: Gapoktan Naga Bahar Kecamatan Koto XI tarusan jumlah pembelian gabah sebanyak 5.710 kg dan beras 1.700 kg, Galoktan Kobaya Maju Bersama Kecamatan Bayang jumlah pembelian gabah 5.710 kg, Gapoktan Pagar Gunung Saiyo Kecamatan IV Jurai jumlah pembelian gabah 25.584 kg, Gapoktan

Serumpun Kecamatan IV Jurai jumlah pembelian gabah 25.584 kg, Gapoktan Maju Bersama Kecamatan Sutera jumlah pembelian gabah 2.720 kg dan Gapoktan Usaha Bersama Kecamatan Linggo Sari Baganti jumlah pembelian gabah 4.790 kg.

- Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 99,68%.

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia (TTI) dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen). Sebelum menetapkan Gapoktan yang akan mendapat bantuan Pemerintah kegiatan PUPM Tahun 2018, maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terlebih dahulu melakukan CPCL. Hasil CP/CL dilakukan verifikasi di Kabupaten bahwa yang akan mendapat bantaun pemerintah pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) tahun anggaran 2018 adalah : Gapoktan Sungai Tunu Utara mempunyai 6 (enam) Toko Tani Indonesia (TTI) yaitu : TTI Iwil, TTI Iral, TTI Weri, TTI Buyuang, TTI Eci, TTI Ineng. Gapoktan Batang Timbulun mempunyai 2 (dua) TTI yaitu TTI Asam limau kapeh dan TTI Koto Rama. Pencaliran dana modal dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan total Rp 100.000.000 dan pencairan dana operaional dilakukan dalam 2 tahap dengan total 37.400.000,- sedangkan dana kompensasi dicairkan berdasarkan kenaikan harga gabah di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total pencairan Rp 22.600.000,-. Jumlah

pencairan gabah oleh Gapoktan Sungai Tunu Utara adalah sebanyak 65.731 kg dan Gapoktan Batang Timbulun sebanyak 65.215 kg. Harga pembelian gabah berkisar 5.300-5.400/kg.

- Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,15 %.

Analisis Neraca Bahan Makanan menginformasikan kondisi ketersediaan bahan pangan dan jumlah kebutuhan untuk dikonsumsi penduduk dalam tingkat ketersediaan energi dan protein dengan perbandingan dari hasil rekomendasi WNPG VIII tahun 2012 dimana tingkat ketersediaan energi perorang minimal 2400 Kkal dan 63 gr protein.

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan.

- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 94,66 %. Promosi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitunya Festival langkisau, Hari Pangan Sedunia Tingkat Propinsi di Kabupaten Dharmasraya dan Hari Pangan Nusantara di Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Kegiatan Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 71,75 %.

Kegiatan ini merupakan penunjang/pendampingan kegiatan yang didanai oleh APBN. Kelompok KWT yang menerima bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah 5 (lima) kelompok yaitu Dasawisma Anggrek II Nagari Kapuah Kecamatan Koto XI Tarusan, KWT Al Ikhlas

Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai, KWT The Ampale Star Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera, KWT bundo Saiyo Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang, Nagari KWT Restu Ibu Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir. Pembinaan juga dilakukan KWT yang tersebar di 15 Kecamatan.

- Kegiatan Percepatan Penanganan Keamanan Konsumsi Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 93,48 %.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, untuk tahun 2018 ini Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk tim Koordinasi dan Tim Tekhnis Keamanan pangan, berdasarkan hasil kegiatan 2018, masih perlu dilakukan peningkatan jumlah kegiatan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan kedepan. Kegiatan sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah dilakukan di 8 (delapan) kecamatan dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pengetahuan kepada Kelapa Sekolah, pedagang jajanan, siswa, guru dan orang tua siswa, memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi agar kandungan gizi dan mutu pangan tetap bernilai. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

- Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 79,73 %.

Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan merupakan kegiatan yang menjadi dasar dalam penetapan perencanaan kegiatan peningkatan status gizi masyarakat yang dicerminkan dengan nilai skor PPH, untuk tahun 2018 skor PPH berdasarkan data Susenas yang di adjustifikasi didapatkan skor sebesar 80,5%, untuk meningkat skor PPH perlu berbagai usaha seperti Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, lomba B2SA, sosialisasi tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan keluarga.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 97,95%.

Dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2018 yang diangkat menjadi tema pembahasan adalah Sinergitas Keamanan Pangan menuju Indonesia Berdaulat. Hasil rumusan rapat dewan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagai berikut (a) keamanan pangan harus dilihat sebagai sistem keamanan pangan yang dimulai dari panen, pasca panen dan pengolahan pangan yang halal dan baik, (b) keamanan pangan harus ditangani secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan stakeholder mulai dari pemerintah, prtodusen dan konsumen (c) perlu adanya jaminan keamanan pangan bagi konsumen mulai dari anak sekolah sampai masyarakat luas (d) perlu pengawasan terhadap peredaran zat-zat berbahaya terhadap produksi dan pengolahan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan (e) memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang zat-zat berbahaya pada pangan melalui sosialisasi, penyebaran informasi

menggunakan media berupa poster, baliho dan leaflet (f) perlu adanya peraturan tentang keamanan pangan di kabupaten Pesisir Selatan.

- Model Percontohan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 76,05%

Dalam pelaksanaan kegiatan diawali dengan penumbuhan nagarai aman pangan yang dimulai tahun 2017. Tahun 2018 lanjut ke tahap pengembangan yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada komunitasnya tentang bagaimana penanganan keamanan pangan terhadap produk pangan yang diolah. Kader melakukan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai dengan menggunakan alat test kit. Dengan begitu diharapkan masyarakat mulai memiliki kesadaran tentang pentingnya menyajikan pangan yang aman dikonsumsi. Tahap selanjutnya adalah tahap kemandirian dimana masyarakat sudah memiliki kesadaran dan melaksanakan tindakan agar pangan yang dikonsumsi aman dari zat-zat yang membahayakan kesehatan.

- Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 88,23%. Kegiatan yang dilakukan antara lain lomba cipta menu B2SA tingkat Propinsi di Kabupaten Dharmasraya dan mengikuti Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Pelaksanaan Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah untuk menghimbau masyarakat Pesisir Selatan untuk dapat mengkonsumsi makanan yang sehat dengan mengurangi konsumsi beras

dan membiasakan mengkonsumsi sumber karbohidrat selain beras. Untuk lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten juara I diraih oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Juara II Tim Penggerak PKK Kecamatan Silaut dan Juara III Tim Penggerak PKK Kecamatan Lunang. Sementara Harapan I diraih oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Linggo Sari Baganti, Harapan II Tim penggerak PKK Kecamatan Airpura, Harapan III diraih Tim Penggerak PKK Kecamatan Koto XI Tarusan. Untuk tingkat Propinsi Sumatera Barat diwakili oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tapi belum mendapat prestasi saat ini.

- Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 98,32%. Kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan sampel untuk pangan segar, jajanan anak sekolah dan pangan hewani (daging dan ikan) untuk 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 89,87%. Penyusunan masterplan dilaksanakan secara swakelola bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen ranperda tentang ketahanan pangan masyarakat yang berisikan program pembangunan dalam berbagai kegiatan yang meliputi pembangunan fisik, sumber daya manusia,

sumber daya ekonomi pada kawasan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk lebih jelas dapat dijelaskan seperti tabel berikut ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	90%	2.400	2.400	2.420	2.460	2.480	3.955	3974	2.480	2.500	
	Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)		63	63	65	67	69	77,17	86,10	69	71	
2	Penguatan cadangan pangan	60%	60%	20	20	20	20	6	5,25	30	30	
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	90	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan		CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	CV ≤ 5	3,06	5,8	CV ≤ 5	CV ≤ 5	
5	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	90%	90%	78	79	80	81	75,6	80,5	81	82	
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	80	76	77	78	79	83	78,33	79	80	
7	Penanganan daerah rawan pangan	60%	60	-	11	12	12	11	11	12	12	

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yaitu dengan alokasi anggaran Rp 2.094.900.299,00.- dan terealisasi Rp 1.983.146.364,00,- atau tingkat penyerapannya yaitu 94,67%, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3. dibawah ini :

Tabel 3
Capaian Keuangan Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketersediaan pangan	1. Tingkat Ketersediaan pangan Utama (kg/kapita/ tahun)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	473.976.520,00	467.122.640,00	98,55
		Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	39.945.820,00	39.087.420,00	97,85
		Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	21.390.593,00	20.432.500,00	95,52
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	69.721.895,00	68.189.700,00	97,80
		Kegiatan Pemantauan Produksi pangan, jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	61.420.495,00	61.307.000,00	99,82
		Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	95.486.957,00	95.418.800,00	97,89

		Kegiatan Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	30.566.302,00	30.348.000,00	99,29
		Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	48.838.282,00	48.026.000,00	98,34
		Penyusunan Database Ketahanan Pangan	24.175.500,00	23.672.700,00	97,92
		Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ TTI	24.725.733,00	24.647.000,00	99,68
		Kegiatan Analisis Ketersediaan pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan	36.979.585,00	36.001.800,00	98,15
		Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	21.025.538,00	19.991.720,00	95,08
Jumlah			473.976.520,00	467.122.640,00	98,55
2. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan	1. Tingkat konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
	- Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan	400.245.884,00	378.879.237,00	94,66
	- Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita /hari)				

		Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	68.788.300,00	49.358.100,00	71,75
		Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan	18.383.100,00	38.154.242,00	98,67
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan	99.870.759,00	97.827.540,00	97,95
		Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	61.201.680,00	48.795.100,00	98,97
		Kegiatan Model Percontohan Keamanan Pangan	27.655.900,00	21.031.100,00	76,05
		Kegiatan Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	156.113.000,00	137.731.075,00	88,23
		Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu pangan	97.224.855,00	95.594.288,00	98,32
		Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan	89.173.475,00	80.143.400,00	89,87
JUMLAH			1.075.190.353,00	978.989.840,00	91,05
JUMLAH TOTAL			1.549.166.873,00	1.446.112.480,00	93,35

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pangan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah.
2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu.
3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin.
5. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintahan nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
6. Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM pelaku utama dan pelaku usaha.
7. Belum optimalnya kerjasama sinergis diantara SKPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholders dan pemerintah sendiri. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan

pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun direncanakan dan tahun yang akan datang. Berdasarkan rancangan awal Dinas Pangan serta berdasarkan hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2018 sesuai dengan evaluasi renja.

Tabel T-C.31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pangan

NO	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
	PANGAN				3.958.750,00					,00	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		810.500,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		712.150,00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Dinas Pangan	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon dan faks	12 Bulan	70.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Dinas Pangan	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon dan faks	12 Bulan	70.000,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan	12 bulan	87.500,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan	12 bulan	87.500,00	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pangan	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor, tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	12 bulan	110.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pangan	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor, tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	12 bulan	110.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	40.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	40.000,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pangan	Tersedianya barang cetakan, tersedianya penggandaan dokumen	12 bulan	50.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pangan	Tersedianya barang cetakan, tersedianya penggandaan dokumen	12 bulan	50.000,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya barang cetakan, tersedianya penggandaan dokumen	12 bulan	20.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya barang cetakan, tersedianya penggandaan dokumen	12 bulan	20.000,00	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4.000,00	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pangan	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan makan dan minum harian/penjaga kantor	4 laporan	16.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pangan	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan makan dan minum harian/penjaga kantor	4 laporan	16.000,00	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Pangan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	198.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Pangan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	198.000,00	
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pangan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	156.250,00	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pangan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor	12 bulan	14.000,00	Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor	12 bulan	14.000,00	
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur	12 bulan	40.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur	12 bulan	-	-
	<u>Kegiatan</u>					<u>Kegiatan</u>					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat		40.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat		-	
III	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				366.000,00	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				366.000,00	-
	<u>Kegiatan</u>					<u>Kegiatan</u>					
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya komputer,laptop, dan printer	1 unit, 2 unit, 4 unit	100.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pangan	Tersedianya komputer,laptop, dan printer	1 unit, 2 unit, 2 unit	75.000,00	
2	Pengadaan Meubiler	Dinas Pangan	Tersedianya pengadaan rak arsip gantung	1 paket, 3 unit	30.000,00	Pengadaan Meubiler	Dinas Pangan	Tersedianya pengadaan rak arsip gantung	1 paket, 3 unit	30.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Dinas Pangan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit	125.000,00	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Dinas Pangan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit	125.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Dinas Pangan	Terlaksananya pemeliharaan mobil dan sepeda motor	2 unit mobil, 5 unit motor	100.000,00	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Dinas Pangan	Terlaksananya pemeliharaan mobil dan sepeda motor	2 unit mobil, 5 unit motor	100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pangan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor laptop, komputer, AC, genset SIPKD dan running text	10 unit laptop, 4 unit komputer, 10 unit AC, 1 unit genset, 1 paket SIPKD dan 1 unit running text	20.000,00	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pangan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor laptop, komputer, AC, genset SIPKD dan running text	10 unit laptop, 4 unit komputer, 10 unit AC, 1 unit genset, 1 paket SIPKD dan 1 unit running text	11.000,00	
IV	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)		Meningkatkan ketersediaan pangan		1.717.000,00	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)		Meningkatkan ketersediaan pangan		1.702.000,00	-
	<u>Kegiatan</u>					<u>Kegiatan</u>					
1	Penanganan Daerah Rawan pangan	Kab. Pessel	Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan	15 Kecamatan	80.000,00	Penanganan Daerah Rawan pangan	Kab. Pessel	Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan	15 Kecamatan	150.000,00	
2	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kab. Pessel	Jumlah Kelompok desa mandiri pangan yang aktif	14 Kelompok	67.000,00	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kab. Pessel	Jumlah Kelompok desa mandiri pangan yang aktif	14 Kelompok	67.000,00	
3	Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)	Kab. Pessel	Jumlah lumbung pangan yang dibangun/diperbaiki dan RMU serta sarana lainnya	4 unit	0	Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)	Kab. Pessel	Jumlah lumbung pangan yang dibangun/diperbaiki dan RMU serta sarana lainnya	4 unit	0	
4	Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Kab. Pessel	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif	23 Kelompok lumbung pangan	70.000,00	Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Kab. Pessel	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif	23 Kelompok lumbung pangan	70.000,00	
5	Penunjang DAK Ketahanan Pangan	Kab. Pessel	Tersedianya dana penunjang DAK	4 unit	200.000,00	Penunjang DAK Ketahanan Pangan	Kab. Pessel	Tersedianya dana penunjang DAK	4 unit	200.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	Kab. Pessel	Tersedianya informasi pasokan, akses dan harga pangan	Informasi Pasokan akses dan harga di 15 pasar kecamatan	80.000,00	Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	Kab. Pessel	Tersedianya informasi pasokan, akses dan harga pangan	Informasi Pasokan akses dan harga di 15 pasar kecamatan	80.000,00	
7	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Kab. Pessel	Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat	50 Ton Beras CPP	650.000,00	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Kab. Pessel	Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat	50 Ton Beras CPP	650.000,00	
7	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Kab. Pessel	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 dokumen	50.000,00	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Kab. Pessel	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 dokumen	50.000,00	
8	Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Kab. Pessel	Jumlah LDPM yang aktif	6 Gapoktan	200.000,00	Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Kab. Pessel	Jumlah LDPM yang aktif	6 Gapoktan	80.000,00	
9	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Kab. Pessel	Terbentuknya kawasan mandiri pangan	1 (satu) kawasan	200.000,00	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Kab. Pessel	Terbentuknya kawasan mandiri pangan	1 (satu) kawasan	200.000,00	
10	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Kab. Pessel	Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan	1 dokumen	35.000,00	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Kab. Pessel	Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan	1 dokumen	35.000,00	
11	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ TTI	Kab. Pessel	Terlaksananya pembinaan Toko Tani Indonesia (TTI) yang sudah terbentuk	4 TTI	80.000,00	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ TTI	Kab. Pessel	Terlaksananya pembinaan Toko Tani Indonesia (TTI) yang sudah terbentuk	4 TTI	80.000,00	
12	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Pessel	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan	1 dokumen	55.000,00	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Pessel	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan	1 dokumen	55.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kab. Pessel	Tersedianya laporan kewaspadaan pangan	12 Bulan	55.000,00	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kab. Pessel	Tersedianya laporan kewaspadaan pangan	12 Bulan	0	
IV	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			4 kegiatan	1.800.000,00	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			4 kegiatan	1.580.000,00	-
	<u>Kegiatan</u>					<u>Kegiatan</u>					
1	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kab. Pessel	Jumlah pameran/promosi pangan yang diikuti	4 kegiatan	300.000,00	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kab. Pessel	Jumlah pameran/promosi pangan yang diikuti	4 kegiatan	300.000,00	
2	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kab. Pessel	Jumlah KRPL yang dibina, dokumen identifikasi Calon Lokasi KRPL	10 KRPL, 1 dokumen	370.000,00	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kab. Pessel	Jumlah KRPL yang dibina, dokumen identifikasi Calon Lokasi KRPL	10 KRPL, 1 dokumen	150.000,00	
3	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Kab. Pessel	Jumlah sosialisasi keamanan pangan yang dilaksanakan	10 kali	100.000,00	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Kab. Pessel	Jumlah sosialisasi keamanan pangan yang dilaksanakan	10 kali	100.000,00	
4	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Kab. Pessel	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	1 dokumen	100.000,00	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Kab. Pessel	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	1 dokumen	100.000,00	
5	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Kab. Pessel	Jumlah rumusan yang dihasilkan dari Dewan Ketahanan Pangan	1 rumusan	200.000,00	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Kab. Pessel	Jumlah rumusan yang dihasilkan dari Dewan Ketahanan Pangan	1 rumusan	200.000,00	
6	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Kab. Pessel	Jumlah kelompok usaha pangan lokal yang aktif	1 kelompok	100.000,00	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Kab. Pessel	Jumlah kelompok usaha pangan lokal yang aktif	1 kelompok	100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Model Percontohan Keamanan Pangan	Nagari Ampang Pulau	Jumlah nagari aman pangan yang dikembangkan	1 nagari	170.000,00	Model Percontohan Keamanan Pangan	Nagari Ampang Pulau	Jumlah nagari aman pangan yang dikembangkan	1 nagari	170.000,00	
8	Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Kab. Pessel	Jumlah lomba cipta menu B2SA	3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	200.000,00	Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Kab. Pessel	Jumlah lomba cipta menu B2SA	3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	200.000,00	
9	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	15 Kecamatan	Persentase pangan yang aman	79%	260.000,00	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	15 Kecamatan	Persentase pangan yang aman	79%	150.000,00	
	JUMLAH				4.582.500,00					4.432.500,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja disusun melalui 2 tahapan, yaitu proses inventarisir indikator Renja Perangkat Daerah, berupa sub-sub kegiatan yang bersifat *top down* berasal dari himpunan kebutuhan program kegiatan dan *bottom up* melalui musrenbang. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut diakomodasi dalam Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Sebagai upaya capaian indikator kinerja, maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2018 diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sikap wanita tani dan anggota dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- b. Tersedianya peta kerawanan pangan sebagai data base Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Tersosialisasi keamanan pangan segar mutu bagi aparatur.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus lumbung pangan masyarakat tentang cara pengelolaan lumbung masyarakat.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dan pengurus lembaga keuangan desa melalui pelatihan administrasi pembukuan kelompok desa mandiri pangan.
- f. Meningkatkan pengelolaan dan keterampilan kelompok dalam pelatihan pengolahan pangan.

- g. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan sinergitas pembangunan berbagai sektor terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, disusun berpedoman pada Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronkan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Secara umum, kebijakan pembangunan pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat mengacu pada 9 agenda prioritas pembangunan nasional (NAWA CITA), dimana sektor pangan termasuk dalam agenda: 6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi domestik. Dalam kerangka demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan

stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional.

Pembangunan ketahanan pangan terdapat keterkaitan yang jelas dengan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yaitu mengacu pada misi-4 “Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merujuk pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2019 yang berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Sejalan dengan kebijakan RPJMD pada misi ke-4 tersebut di atas, Tujuan dan sasaran pembangunan pada Dinas pangan tahun 2019 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Misi-4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
Mewujudkan Ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan pangan	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/ tahun	142
	2. Meningkatkan penganekara-gaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi Pangan	
		Konsumsi Energi (kkal/kapita/ hari)	2.200
		Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	58

Guna mencapai indikator sasaran tersebut ditunjang dengan perumusan indikator sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat
- b. Makin baiknya Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
- d. Tersedianya pasokan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Berkurangnya daerah rawan pangan/gizi buruk

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, merupakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Didalam tahapan penyusunan program dan kegiatan tersebut dijelaskan bahwa jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya maka akan dilakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan yang tersaji dalam RKPD Tahun 2019.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
Belanja Rutin						
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan perkantoran	769.500.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	366.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Sumberdaya aparatur	0
Belanja Renja				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		5.110.000.000
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Meningkatkan ketersediaan pangan	1.717.000.000
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan	150.000.000
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah kelompok desa mandiri pangan yang aktif	67.000.000
				Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)	Jumlah lumbung pangan yang dibangun/diperbaiki dan RMU serta sarana lainnya	0
				Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif	70.000.000
				Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan	Tersedianya informasi pasokan, akses dan	80.000.000

				Distribusi Pasokan Pangan dan HBKN	harga pangan	
				Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat	650.000.000
				Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	50.000.000
				Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah LDPM yang aktif	80.000.000
				Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Terbentuknya kawasan mandiri pangan	200.000.000
				Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan	35.000.000
				Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / TTI	Terlaksananya pembinaan TTI yang sudah terbentuk	80.000.000
				Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya dokumen analisis ketersediaan pangan	55.000.000
				Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	Terlaksananya pemantauan dan analisis terhadap kondisi pangan dan gizi masyarakat	0
				Penunjang DAK Ketahanan Pangan	Tersedianya dana penunjang DAK	200.000.000
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan		1.580.000.000

				Masyarakat		
				<u>Kegiatan</u>		
				Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah pameran/promosi pangan yang diikuti	300.000.000
				Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina, dokumen identifikasi calon lokasi KRPL	150.000.000
				Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Jumlah sosialisasi keamanan pangan yang dilaksanakan	100.000.000
				Penyusunan Pola Pangan Harapan	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	100.000.000
				Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rumusan yang dihasilkan dari Dewan Ketahanan Pangan	200.000.000
				Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah kelompok usaha pangan lokal yang aktif	100.000.000
				Model Percontohan Keamanan Pangan	Jumlah nagari aman pangan yang dikembangkan	170.000.000
				Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Jumlah lomba cipta menu B2SA	200.000.000
				Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase pangan yang aman	260.000.000
				JUMLAH		4.432.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pangan

Rencana Kerja mencakup rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dana indikatif beserta sumber dana/pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan serta prakiraan maju tahun 2021 berdasarkan pagu indikatif. Adapun Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DINAS PANGAN

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp. 000)			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	02	03	01			PANGAN								
				01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	<u>769.500,00</u>			12 Bulan	<u>769.500,00</u>
						<u>Kegiatan</u>								
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon dan faks	Dinas Pangan	12 bulan	70.000,00	APBD		12 bulan	70.000,00

						07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan	Dinas Pangan	12 bulan	87.500,00	APBD		12 bulan	87.500,00
						08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor, tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	Dinas Pangan	12 bulan	110.000,00	APBD		12 bulan	110.000,00
						10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Pangan	12 bulan	40.000,00	APBD		12 bulan	40.000,00
						11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, tersedianya penggandaan dokumen	Dinas Pangan	12 bulan	50.000,00	APBD		12 bulan	50.000,00
						12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan	Dinas Pangan	12 bulan	20.000,00	APBD		12 bulan	20.000,00
						15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pangan	12 bulan	4.000,00	APBD		12 bulan	4.000,00

					17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat, tersedianya makan minum tamu, dan makan dan minum harian/penjaga kantor	Dinas Pangan	12 bulan	16.000,00	APBD		12 bulan	16.000,00
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pangan	12 bulan	198.000,00	APBD		12 bulan	198.000,00
					19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Pangan	12 bulan	160.000,00	APBD		12 bulan	160.000,00
					21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor	Dinas Pangan	12 bulan	14.000,00	APBD		12 bulan	14.000,00
				02		Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur				366.000,00			-	366.000,00
						<u>Kegiatan</u>								
					09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan komputer, laptop, dan printer	Dinas Pangan	1 unit, 2 unit,4 unit	100.000,00	APBD		1 unit, 2 unit,2 unit	100.000,00

					10	Pengadaan Meubiler	Terlaksananya rak arsip gantung	Dinas Pangan	3 unit	30.000,00	APBD		3 unit	30.000,00
					22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Dinas Pangan	1 unit	125.000,00	APBD		1 unit	125.000,00
					24	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya pemeliharaan mobil dan sepeda motor	Dinas Pangan	2 unit mobil, 5 unit motor	100.000,00	APBD		2 unit mobil, 5 unit motor	100.000,00
					28	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor laptop, komputer, AC, genset SIPKD dan running text	Dinas Pangan	10 unit laptop, 4 unit komputer, 10 unit AC, 1 unit genset, 1 paket SIPKD dan 1 unit running text	11.000,00	APBD		10 unit laptop, 4 unit komputer, 10 unit AC, 1 unit genset, 1 paket SIPKD dan 1 unit running text	11.000,00
				05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumberdaya aparatur			-	-	-	-	-
						<u>Kegiatan</u>								
					02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	Dinas Pangan	-	-	APBD		-	-
				16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Meningkatkan ketersediaan pangan			<u>1.717.000,00</u>	-	-	-	<u>1.667.000,00</u>
						<u>Kegiatan</u>								

					01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan	Kab. Pessel	15 Kecamatan	150.000,00	APBD		15 Kecamatan	150.000,00
					14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Kelompok desa mandiri pangan yang aktif	Kab. Pessel	14 Kelompok	67.000,00	APBD		14 Kelompok	67.000,00
					32	Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)	Jumlah lumbung pangan yang dibangun/diperbaiki dan RMU serta sarana lainnya	Kab. Pessel	5 unit	-	APBD		5 unit	-
					43	Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif	Kab. Pessel	23 Kelompok lumbung pangan	70.000,00	APBD		23 Kelompok lumbung pangan	70.000,00
					45	Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	Tersedianya informasi pasokan, akses dan harga pangan	Kab. Pessel	Informasi Pasokan akses dan harga di 15 pasar kecamatan	80.000,00	APBD		Informasi Pasokan akses dan harga di 15 pasar kecamatan	80.000,00
					46	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat	Kab. Pessel	50 Ton Beras CPP	650.000,00	APBD		50 Ton Beras CPP	650.000,00
					52	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Kab. Pessel	1 dokumen	50.000,00	APBD		-	-

								Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang	Poktan Bina Karya						
					68	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan	Kab. Pessel	1 dokumen	55.000,00	APBD		1 dokumen	55.000,00	
					70	Penunjang DAK Ketahanan Pangan	Tersedianya dana penunjang DAK	Kab.Pessel	4 unit	200.000,00	APBD		4 unit	200.000,00	
				17		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				<u>1.580.000,00</u>	-	-	-	<u>1.580.000,00</u>	
						<u>Kegiatan</u>									
					05	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah pameran/promosi pangan yang diikuti	Kab. Pessel	4 kegiatan	300.000,00	APBD		4 kegiatan	300.000,00	
					06	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah KRPL yang dibina, dokumen identifikasi Calon Lokasi KRPL	Kab. Pessel	10 KRPL, 1 dokumen	150.000,00	APBD		10 KRPL, 1 dokumen	150.000,00	

								Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera (100.65126000, -1,59678000)	KWT Kemuning Indah					
								Nagari Sungai Tunu Barat Kec. Ranah Pesisir (100.81754000, -1,84938000)	KWT Barokia Indah					
								Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura (100.94276000, -1,94276000)	KWT Bunga Lestari					
								Nagari Tigo Sepakat Kec. Pancung Soal (100.93556000, -2.08578000)	KWT Harapan Baru					
								Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai	kwT Tigo Sapilin					

								Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	KWT Saiyo						
								Nagari Taratak Kecamatan Sutera	KWT Embung Timbulun						
								Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	KWT Melati Putih						
								Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura	KWT Mekar Sari						
								Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura	KWT Seruni						
					07	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Jumlah sosialisasi keamanan pangan yang dilaksanakan	Kab Pessel	10 kali	100.000,00	APBD		10 kali	100.000,00	

					08	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	Kab Pessel	1 dokumen	100.000,00	APBD		1 dokumen	100.000,00
					09	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rumusan yang dihasilkan dari Dewan Ketahanan Pangan	Kab Pessel	1 rumusan	200.000,00	APBD		1 rumusan	200.000,00
					17	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah kelompok usaha pangan lokal yang aktif	Koto Kandis Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang)	1 kelompok (KWT Kelok Indah	100.000,00	APBD		2 kelompok	100.000,00
								(-1.67356000, 100.78926000)						
					22	Model Percontohan Keamanan Pangan	Jumlah nagari aman pangan yang dikembangkan	Kec. Koto XI Tarusan (Nagari Ampang Pulai)	1 nagari	170.000,00	APBD		1 nagari	170.000,00
					23	Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan lomba cipta menu B2SA yang dilaksanakan dan diikuti	Kab.Pessel	1 kali, 3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	200.000,00	APBD		3 kali lomba (Kab, Prop, Nasional)	200.000,00

					25	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase pangan yang aman	15 Kecamatan	79%	260.000,00	APBD		80%	260.000,00
						J U M L A H				<u>4.432.500,00</u>	-	-	-	<u>4.382.500,00</u>

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang nagari, musrenbang kecamatan sampai musrenbang tingkat Kabupaten Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 di lingkup Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Semoga Renja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Painan, April 2019
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN


ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

